

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR NBP 6
TAHUN 2025**



**JL SM RAJA NO 81 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC.
TANAH JAWA, KAB. SIMALUNGUN
TELEPON: (0622) 7562048**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR NBP 6
Alamat	JL SM RAJA NO 81 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH JAWA, KAB. SIMALUNGUN
Nomor Telepon	(0622) 7562048

Penjelasan Umum:

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK No 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT ENAM menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang Tahun 2025 yang mencakup struktur Tata Kelola, Proses dari pelaksanaan Tata Kelola dan Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank, serta untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan menciptakan nilai perusahaan pada PT BPR NBP 6 secara berkelanjutan, berlandaskan ketentuan perundang-undangan, standar, nilai-nilai etika dan praktik yang berlaku, maka PT BPR NBP 6 menyampaikan Laporan Transparansi Tata Kelola pada PT BPR NBP 6 dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparency (Keterbukaan)
2. Accountability (Akuntabilitas)
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
4. Idependency (Independensi)
5. Fairness (Kewajaran)

BPR telah mengungkapkan seluruh aspek tranparasni Tata Kelola dalam format ini.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



1.	Nama	Lisna Kristina Raya Saragi
	Jabatan	Direktur Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<p>a. Menjalankan tugas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan;</p> <p>b. Melaksanakan tugas dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;</p> <p>c. Mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS;</p> <p>d. Menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di perseroan secara terintegrasi;</p> <p>e. Menetapkan sasaran kinerja perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja perseroan;</p> <p>f. Menjaga citra perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan;</p> <p>g. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan Hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas dan lembaga lain;</p> <p>h. Menugaskan dan mengangkat pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan;</p> <p>i. Mengatur ketentuan tentang pegawai perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang telah disusun;</p> <p>k. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta tata kelola perusahaan yang baik;</p> <p>l. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. Mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai;</p> <p>n. Menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>o. Melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan perseroan dalam batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p>		
2.	Nama	Parlagutan
	Jabatan	Direktur
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<p>a. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;</p> <p>b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Memantau dan menjaga kepatutan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat</p>		

- oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain;
- d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
 - e. Melaporkan kepada Anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
 - f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;
 - g. Menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di perseroan secara terintegrasi;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Direksi telah membuat Deposito Berhadiah.
- b. Direksi telah merekrut AO Lending dan AO Funding.
- c. Direksi memonitoring dan menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan OJK.
- d. Telah dilakukan pembelian HP untuk pengurus.
- e. Direksi telah melaksanakan pengadaan mobil kas keliling di April 2026

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Hengky Parsungkun
	Jabatan	Komisaris Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor ekstern serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan peraturan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS sesuai undang-undang dan anggaran dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas jasa keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- g. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud di dalam RUPS;
- h. Melakukan tugas lainnya sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengawasan sebagai dewan komisaris untuk kepentingan BPR;
- i. Menjalankan dan mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik, tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan yang berlaku.



2.	Nama	Rasmahita Sitanggung
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor ekstern serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan peraturan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS sesuai undang-undang dan anggaran dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas jassa keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- g. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud di dalam RUPS;
- h. Melakukan tugas lainnya sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengawasan sebagai dewan komisaris untuk kepetingan BPR;
- i. Menjalankan dan mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik, tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Dekom menyarankan agar membuka layanan Deposito Berhadiah, yaitu program penghimpunan dana di mana nasabah akan langsung memperoleh hadiah menarik di awal pembukaan deposito, sesuai dengan nominal dan tenor yang disepakati.
- b. Dekom menyarankan penambahan tenaga AO Lending dan AO Funding disetiap wilayah kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Dekom menyarankan agar Direksi memonitoring dan menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan OJK.
- d. Dekom menyarankan Sesuai dengan Risalah RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2025 maka akan dilakukan pembelian inventaris berupa Handphone kepada Pengurus untuk mendukung kerja Pengurus. Adapun Handphone yang akan dibeli merk Samsung.
- e. Dekom menyarankan agar direncanakan pengadaan mobil kas keliling untuk Kantor Pusat pada semester I tahun 2026 sebagai upaya memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk perbankan BPR.
- f. Dekom menyarankan agar rencana pembukaan kantor kas baru di 50 lokasi perdagangan, sebagai bagian dari strategi ekspansi jaringan dan peningkatan penetrasi layanan BPR di wilayah potensial.
- g. Dekom meminta agar rencana penghapusbukuan (hapus buku) aset tetap diinventarisir kembali secara menyeluruh dan disusun dengan baik untuk kemudian dimasukkan dalam RBB 2026, guna menjaga akurasi dan transparansi pelaporan aset perusahaan



4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Bank belum memiliki Komite Audit

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Bank belum memiliki Komite Audit

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Hengky Parsungkunan
	Persentase Kepemilikan (%)	0,68
2.	Nama	Rasmahita Sitanggang
	Persentase Kepemilikan (%)	0,68

Direksi tidak memiliki saham pada BPR

Masing-masing Dewan Komisaris memiliki saham 0,68 % pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Hengky Parsungkunan
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	0,92
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,87

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	PT NBP
----	------	--------



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 1
	Persentase Kepemilikan (%)	65,60
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	65,60
2.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 2
	Persentase Kepemilikan (%)	50,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	50,00
3.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 3
	Persentase Kepemilikan (%)	90,57
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	90,57
4.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 4
	Persentase Kepemilikan (%)	71,32
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	71,32
5.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 6
	Persentase Kepemilikan (%)	67,99
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	67,99
6.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 7
	Persentase Kepemilikan (%)	97,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	97,00
7.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 8
	Persentase Kepemilikan (%)	74,97



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,97
8.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 9
	Persentase Kepemilikan (%)	88,53
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	88,53
9.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 10
	Persentase Kepemilikan (%)	93,81
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	93,81
10.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 11
	Persentase Kepemilikan (%)	81,08
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	81,08
11.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 12
	Persentase Kepemilikan (%)	56,94
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	56,94
12.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 14
	Persentase Kepemilikan (%)	63,28
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	63,28
13.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 15
	Persentase Kepemilikan (%)	77,52
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	77,52



	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 16
	Persentase Kepemilikan (%)	74,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,00
15.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 17
	Persentase Kepemilikan (%)	75,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	75,75
16.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 18
	Persentase Kepemilikan (%)	89,85
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	89,85
17.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 19
	Persentase Kepemilikan (%)	72,61
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,61
18.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 20
	Persentase Kepemilikan (%)	76,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,75
19.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	82,84
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	82,84
20.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 24



	Persentase Kepemilikan (%)	72,97
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,97
21.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 25
	Persentase Kepemilikan (%)	92,45
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	92,45
22.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 27
	Persentase Kepemilikan (%)	76,21
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,21
23.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 28
	Persentase Kepemilikan (%)	76,38
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,38
24.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 29
	Persentase Kepemilikan (%)	74,73
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,73
25.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 31
	Persentase Kepemilikan (%)	72,68
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,68
26.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 32
	Persentase Kepemilikan (%)	58,31
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	58,31



27.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 33
	Persentase Kepemilikan (%)	78,58
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	78,58
28.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 34
	Persentase Kepemilikan (%)	92,15
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	92,15
29.	Nama	SAIKUM SIREGAR, SE, MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 1
	Persentase Kepemilikan (%)	3,17
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,17
30.	Nama	SAIKUM SIREGAR, SE, MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 19
	Persentase Kepemilikan (%)	1,70
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	1,70
31.	Nama	SAIKUM SIREGAR, SE, MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 27
	Persentase Kepemilikan (%)	0,43
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,43
32.	Nama	SAIKUM SIREGAR, SE, MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	0,92
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,92
33.	Nama	Dr. C. Soguntaron Hutasoit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 4



	Persentase Kepemilikan (%)	12,44
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,03
34.	Nama	Dr. C. Soguntaron Hutasoit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 10
	Persentase Kepemilikan (%)	2,32
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	2,32
35.	Nama	Dr. C. Soguntaron Hutasoit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 14
	Persentase Kepemilikan (%)	25,21
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,21
36.	Nama	Dr. C. Soguntaron Hutasoit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 31
	Persentase Kepemilikan (%)	8,54
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,54
37.	Nama	Hengky Parsungkunan
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	0,92
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,87

Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada kelompok usaha (bukan pada BPR) antara lain PT NBP sebagai pemegang saham pengendali pada masing-masing BPR NBP Grup dan terdapat 3 orang dari 5 pemegang saham di PT BPR NBP 6 yaitu memiliki saham pada BPR lainnya. pada keterangan diatas menjelaskan Komisaris utama juga memiliki saham di salah satu BPR NBP grup yaitu PT BPR NBP 22.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Lisna Kristina Raya Saragi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham



	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Parlagutan
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Hengky Parsungkunan
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Rasmahita Sitanggung
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Direksi PT BPR NBP 6 tidak memiliki saham pada perusahaan lain
Dewan Komisaris PT BPR NBP 6 tidak memiliki saham pada perusahaan lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Lisna Kristina Raya Saragi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Parlagutan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Hengky Parsungkunan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Rasmahita Sitanggung
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Lisna Kristina Raya Saragi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Parlagutan
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Hengky Parsungkunan
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Rasmahita Sitanggung
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR
Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp919.200.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp609.600.000



1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp58.200.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp40.608.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp38.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp38.000.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan	Rp325.800.000



Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp122.868.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp29.500.000
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp87.000.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp126.147.154
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan	Rp84.076.100



Komisaris (Rp)

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) **Rp0**

Fasilitas yang diberikan berdasarkan keputusan RUPS

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) **4,60 : 1**

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) **1,27 : 1**

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) **1,09 : 1**

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) **1,42 : 1**

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) **3,19 : 1**

Rasio gaji Pegawai yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai terendah (b) = 4.60 : 1

Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Direksi terendah (b) = 1.27 : 1

Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris terendah (b) = 1.09 : 1



Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris tertinggi (b) = 1.42 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai Tertinggi (b) = 3.19 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	11 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Agenda Rapat 1. Laporan kinerja januari 2025 2. Tindak lanjut temuan OJK 3. Action Plan Kredit Bulan Februari 2025 4. Laporan AI, APU PPT, MR dan Kepatuhan 5. Lain-lain		
2.	Tanggal Rapat	10 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Agenda Rapat 1. Notulen rapat sebelumnya 2. Kinerja bulan februari dan maret 2025 3. Action plan kredit dan dana 4. Laporan AI dan Tindak lanjut temuan OJK 5. Laporan APU PPT, Kepatuhan dan MR 6. Lain-lain		
3.	Tanggal Rapat	05 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Agenda Rapat 1. Notulen rapat sebelumnya (bln maret 2025) 2. Kinerja bulan april 2025 dan persiapan CKPN 3. Action plan kredit bulan mei 2025 4. Laporan Audit Intern 5. APU PPT, MR dan Kepatuhan 6. Lain-lain		
4.	Tanggal Rapat	25 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Agenda Rapat 1. Tindak lanjut notulen sebelumnya 2. Evaluasi kinerja BPR terhadap RBB BPR bulan mei dan juni 2025		



3. Strategi dan kebijakan peningkatan kualitas kredit
4. Strategi dan kebijakan peningkatan funding
5. Strategi dan kebijakan peningkatan lending
6. Pelaksanaan SAKEP dan CKPN
7. Laporan SKAI, MR, APU PPT dan Kepatuhan
8. Lain-lain

5.	Tanggal Rapat	04 Agustus 2025
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Agenda Rapat

1. Perkembangan kinerja BPR s/d bulan juni 2025
2. Laporan audit intern bulan juli 2025
3. Laporan APU PPT, MR dan SDM
4. Lain-lain

6.	Tanggal Rapat	11 September 2025
----	---------------	-------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Agenda Rapat

1. Kinerja bilan agustus
2. Tindaklanjut temuan OJK
3. CKPN
4. Laporan audit intern, kepatuhan dan MR
5. Rencana Gathering

7.	Tanggal Rapat	05 November 2025
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Agenda Rapat

1. Evaluasi kinerja oktober
2. Pembahasan RBB 2026
3. Tindaklanjut temuan OJK
4. Rencana perayaan HUT, Family gathering dan Natal
5. Lain-lain

8.	Tanggal Rapat	05 Desember 2025
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Agenda Rapat

1. Evaluasi kinerja november 2025
2. Action plan kredit di bulan desember 2025
3. Pembahasan RBB 2026



4. Rencana perayaan HUT, Family gathering dan Natal
5. Rencana grand opening kantor
6. Lain-lain

Dewan Komisaris PT BPR NBP 6 melakukan rapat 8 kali selama 1 tahun 2025

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hengki Parsungkun Sitorus
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	4 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Rasmahita Sitanggung
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	4 kali hadir

Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan 8 kali dalam satu tahun

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus



1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus



1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Pada tahun 2025 tidak ada penyimpangan Fraud

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	2 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

1 Permasalahan hukum perdata yang telah selesai An Andre Fernando Sinaga

2 Permasalahan hukum yang sedang dihadapi An Randi Hasim dan Freddy Simanjuntak

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2025 PT BPR NBP 6 tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	Acara MTQ Kabupaten Simalungun
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	14 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	Acara grasstrack & motocross di tanjung pasir
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	21 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	HUT RI ke 80 kecamatan tanah jawa
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	01 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	HUT RI ke 80 kecamatan dolok batu nanggar
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	01 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara



	Penjelasan Kegiatan	HUT RI ke 80 Nagori tangga batu
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	06 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	HUT RI ke 80 kecamatan Hutabayuraja
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	08 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	HUT RI ke 80 Anseli aek nauli
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	12 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	HUT RI ke 80 kelurahan pematang tanah jawa
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	28 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ristiawan
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan sembako untuk nasabah yang usahanya terbakar di pajak serbelawan an Ristiawan
	Jumlah (Rp)	Rp2.980.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	29 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi kejuaraan voli piala Bupati Simalungun
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	10 Oktober 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana pembangunan GKPI JK Bombongan
	Jumlah (Rp)	Rp150.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	21 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Hotma Nainggolan
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian sembako untuk rumah nasabah kebakaran an Hotma Nainggolan
	Jumlah (Rp)	Rp417.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	02 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Korban bencana
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian donasi kepada korban bencana Tapteng
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	09 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Korban bencana
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian donasi bencana alam sumatera utara
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia natal
	Penjelasan Kegiatan	Perayaan natal SDN 097328 ujung mulia
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia pembangunan
	Penjelasan Kegiatan	Pembangunan HKBP bangun resort



	Jumlah (Rp)	Rp300.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	17 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia natal
	Penjelasan Kegiatan	Perayaan natal SDN 091513 jawa tengah
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	18 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia natal
	Penjelasan Kegiatan	Perayaan natal SD buntu gading hatonduhan
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	22 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia HUT
	Penjelasan Kegiatan	HUT Media Nasional Cakrawala
	Jumlah (Rp)	Rp150.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	23 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bapak Yayasan
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan sembako ke Panti ODGJ Yayasan sinar harapan kasih bapa
	Jumlah (Rp)	Rp3.128.000

PT BPR NBP 6 memberikan dana kegiatan sosial di tahun 2025



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR NBP 6 untuk tahun 2025.
Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

TANAH JAWA, 15 April 2026

PT BPR NBP 6

Menyetujui

LISNA KRISTINA RAYA SARAGI
DIREKTUR UTAMA

HENGKY PARSUNGKUNAN
KOMISARIS UTAMA